

Mencegah Konflik di Aceh Strategi Komunikasi untuk Menjembatani TNI dan Eks Kombatan Gam

¹Bustami, ²Hasan Sazali

¹⁻²UIN Sumatera Utara Medan

bustamimina36@gmail.com

ABSTRACT

The Aceh conflict was one of the bloodiest conflicts in Indonesia which lasted for 30 years. Even though a peace agreement was signed in 2005, the potential for conflict still exists, especially between the TNI and former GAM fighters. This is caused by several factors such as distrust, past trauma, and lack of effective communication. The aim of this research is to analyze effective communication strategies in preventing conflict in Aceh, especially between the TNI and former GAM fighters. This research uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data collection was carried out by interviewing various parties, including the TNI, former GAM fighters, community leaders and researchers. The results of this research identified several effective communication strategies for preventing conflict in Aceh, including: First, establishing open and transparent communication between the TNI and former GAM fighters. This can be done through dialogue, regular meetings and joint action. Second, increase mutual understanding and tolerance between the TNI and former GAM fighters. This can be done through education and training on Acehnese culture and history. Third, build trust and mutual respect between the TNI and former GAM fighters. This can be done by showing a commitment to resolving problems peacefully and fairly. Fourth, civil society must be involved in conflict prevention activities. This can be done through community empowerment programs and peaceful conflict resolution. The conclusion of this research is that effective communication is the key to preventing conflict in Aceh. The communication strategy proposed in this research can help build trust and mutual respect between the TNI and former GAM fighters and encourage lasting peace in Aceh.

Keywords: Aceh conflict, TNI, former GAM fighters, communication strategy, conflict prevention

ABSTRAK

Konflik Aceh merupakan salah satu konflik paling berdarah di Indonesia yang berlangsung selama 30 tahun. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani pada tahun 2005, potensi konflik masih ada, khususnya antara TNI dan mantan pejuang GAM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakpercayaan, trauma masa lalu, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi yang efektif dalam pencegahan konflik di Aceh, khususnya antara TNI dan eks pejuang GAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai berbagai pihak, antara lain TNI, mantan pejuang GAM, tokoh masyarakat, dan peneliti. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi komunikasi yang efektif untuk pencegahan konflik di Aceh, antara lain: *Pertama*, terjalinnya komunikasi yang terbuka dan transparan antara TNI dan eks pejuang GAM. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, pertemuan rutin dan aksi bersama. *Kedua*, meningkatkan saling pengertian dan toleransi antara TNI dan eks pejuang GAM. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan budaya dan sejarah Aceh. *Ketiga*, membangun

kepercayaan dan saling menghormati antara TNI dan eks pejuang GAM. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil. *Keempat*, masyarakat sipil harus dilibatkan dalam kegiatan pencegahan konflik. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik secara damai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi yang efektif merupakan kunci pencegahan konflik di Aceh. Strategi komunikasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat membantu membangun kepercayaan dan saling menghormati antara TNI dan eks pejuang GAM serta mendorong perdamaian abadi di Aceh.

Kata Kunci: Konflik Aceh, TNI, eks pejuang GAM, strategi komunikasi, pencegahan konflik

PENDAHULUAN

Konflik berkepanjangan terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah meninggalkan luka mendalam di kedua belah pihak. Konflik berlangsung lebih dari tiga dekade, yaitu dari tahun 1976 hingga 2005. Meskipun perjanjian damai telah dicapai pada tahun 2005, upaya untuk menjembatani kesenjangan antara TNI dan mantan pejuang GAM terus berlanjut. Komunikasi yang efektif memainkan peranan penting dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi ini.

Perbedaan ideologi, trauma masa lalu, dan ketidakpercayaan yang mendalam di antara para pihak menjadi tantangan utama dalam proses rekonsiliasi. Komunikasi yang buruk dan kesalahpahaman sering kali memperburuk situasi dan menimbulkan ketegangan baru. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk membangun kepercayaan, mengurangi prasangka dan membangun pemahaman bersama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa identitas Aceh akan menjadi dasar mobilisasi melawan Indonesia. Sebaliknya, pemberontakan masyarakat Aceh di bawah pemerintahan Indonesia bergantung pada jalannya; Hal ini dapat ditelusuri ke peristiwa sejarah tertentu dan konflik kepentingan, terutama otonomi yang dinikmati ulama modernis selama revolusi, dan hilangnya otonomi secara dramatis setelahnya. Jika momen-momen kritis tertentu terjadi secara berbeda (misalnya, jika Indonesia melakukan transisi menuju kemerdekaan dengan pemerintahan nasional yang lebih Islami), kita mungkin tidak akan melihat rangkaian peristiwa yang pada akhirnya menghasilkan nasionalisme separatis.

Terlebih lagi, munculnya identitas Aceh sebagai dasar mobilisasi oposisi memerlukan lebih dari sekedar kekecewaan terhadap Indonesia; hal ini juga memerlukan kekalahan terhadap aspirasi Islam para pemimpin Aceh. Memang benar, salah satu implikasi dari bab ini adalah bahwa Islamlah yang menunda munculnya sentimen nasionalis di Aceh. Penafsiran ini bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional, karena pertentangan mengenai peran Islam memicu pemberontakan pertama di Aceh dan dengan demikian mendorong dinamika pemberontakan di kemudian hari. Namun bagi para pemimpin Aceh, termasuk ulama pemberontak pada tahun 1950an, Islam juga merupakan kekuatan utama yang mengikat Aceh dengan wilayah Indonesia lainnya. Keyakinan mereka terhadap persatuan, universalitas, dan

kesetaraan umat (komunitas Islam) mengukuhkan mereka sebagai penganut seagama di tempat lain di nusantara. Ketika para pemimpin Aceh mengisi konsep kosong tentang Indonesia, mereka melakukannya dengan Islam, dan mereka percaya bahwa seluruh Indonesia, bukan hanya Aceh, harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pemberontakan merupakan tanda keterasingan, namun juga merupakan ekspresi komitmen berkelanjutan terhadap perpaduan identitas masyarakat Aceh, Indonesia, dan Islam. Kekalahan pemberontakan mematahkan fusi tersebut dan membuka jalan bagi nasionalisme separatis. Kompromi wilayah khusus mendorong teritorialisasi identitas; Pengalaman internasional di Tiro memberinya kosa kata untuk membayangkan kembali perjuangan Aceh sebagai sebuah bangsa yang berjuang untuk mencapai realisasi diri (Aspinall 20019).

Isu reintegrasi tidak dibahas secara luas selama perundingan Helsinki. Menurut Damien Kingsbury, penasihat GAM selama perundingan, khususnya masalah keamanan dan politik, makna "otonomi khusus", isu partai politik lokal, dan perlunya gencatan senjata merupakan isu utama yang dipertimbangkan. Manfaat reintegrasi atau kompensasi ekonomi tidak disebutkan dalam Program Tiga Poin yang menjadi dasar posisi negosiasi GAM pada perundingan putaran kedua pada bulan Februari 2005 (Kingsbury 2006).

Reintegrasi melibatkan kembalinya mantan gerilyawan ke kehidupan sipil, umumnya setelah berakhirnya konflik. Hal ini merupakan elemen umum dalam perjanjian perdamaian dan dapat melibatkan serangkaian program untuk membantu proses pemulangan, termasuk dukungan keuangan, pelatihan kerja, dan bantuan medis. Ada banyak pengalaman profesional dalam upaya reintegrasi yang tersebar luas dan terus berkembang di seluruh dunia. Panduan umum menekankan perlunya mempertimbangkan dampak para mantan gerilyawan terhadap komunitas tempat mereka kembali, dan oleh karena itu program reintegrasi semakin mencakup bantuan kepada komunitas dan individu yang terkena dampak.

Dalam paradigma perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi internasional (DDR), reintegrasi biasanya diperlakukan sebagai elemen ketiga setelah perlucutan senjata dan demobilisasi. Tindakan umum ini menghubungkan proses perdamaian dengan langkah-langkah yang konkret dan progresif. Hal ini didasarkan pada pengalaman dari berbagai konflik, dan implementasinya sering kali dianggap sebagai latihan teknis. PBB dan badan-badan lainnya telah membentuk unit untuk menyebarkan praktik-praktik terbaik mengenai reintegrasi.

Namun, lingkungan pasca-konflik cenderung tegang secara politik, kompleks, dan spesifik, sehingga penerapan pendekatan internasional menjadi tantangan. Upaya untuk melampaui metode standar dengan memperhatikan konteks lokal dan arus politik tidaklah mudah dilakukan. Beberapa praktisi merasa bahwa karena DDR dipandang sebagai bidang keahlian teknis, badan-badan internasional mengambil risiko untuk mendukung pendekatan-pendekatan standar di bidang yang sangat sensitif secara politik dan lebih bergantung pada keadaan tertentu dibandingkan praktik-praktik terbaik yang umum (Burke 2008).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kerentanan tinggi terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. Agus mengatakan Aceh memiliki potensi konflik yang tinggi karena partai lokal di provinsi tersebut diyakini menjadi wadah aspirasi para mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai lokal Aceh disebut-sebut sebagai wadah yang mempertimbangkan keinginan eks pejuang GAM, dimana hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan antara eks kombatan dan non kombatan," Agus memprediksi konflik horizontal di Aceh. jika hasilnya tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pada masa tenang pemilu presiden dan parlemen serta pemungutan suara di Aceh terdapat beberapa kejadian yang memungkinkan hal serupa terjadi pada pemilu ada serentak berikutnya (Ramadhan 2024).

Berdasarkan narasi dia tas bahwa dengan adanya partai lokasi di Aceh akan memicu konflik di Aceh atau bahkan di Indonesia, jika pandangan konflik itu hanya sebatas masalah kecurangan pemilihan umum (PEMILU) pernah terjadi ketegangan akibat eskalasi politik antara salah satu pasangan calon yang didukung di Aceh, maka sangat sempit pengetahuan kita melihat konflik itu sendiri, dikarenakan kecurangan pemilu tidak hanya saja terjadi di Aceh tetapi juga terjadi di wilayah atau provinsi lain yang mungkin lebih dahsyat dari pada yang terjadi di Aceh. Stagmen Panglima TNI ini bisa membuat perpecahan baru di Aceh antara pendukung calon presiden atau calon legislatif di Aceh. Kehadiran partai lokal di Aceh itu merupakan amanat dari MoU Helsinki atau yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006. Hal ini sesuai dengan pendapat Damien Kingsbury yang mengatakan bahwa didalam MoU tidak hanya dibicarakan tentang otonomi khusus saja tetapi juga tentang partai lokal. Dalam hal ini Panglima TNI atau siapa pun itu yang akan melakukan komunikasi harus terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan dari pernyataan seseorang, dalam hal ini diperlukan strategi komunikasi yang tepat serta yang memberikan kesejukan kepada masyarakat Aceh.

Strategi komunikasi yang tepat dapat membantu membangun saling pengertian, mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antar pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dapat diterapkan untuk melibatkan TNI dan eks pejuang GAM dalam pencegahan konflik di Aceh.

Sejumlah kegiatan komunikasi telah dilakukan, seperti dialog antarkelompok, program reintegrasi dan inisiatif pembangunan perdamaian. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam memahami perspektif masing-masing pihak dan menemukan titik temu untuk mengatasi perbedaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dapat diterapkan untuk mempertemukan pejuang TNI dan eks GAM untuk mencegah konflik di Aceh. Dengan memahami perspektif kedua belah pihak dan mengidentifikasi saluran komunikasi yang efektif, diharapkan dapat menemukan solusi yang mendorong perdamaian dan rekonsiliasi abadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan di lingkungan partisipan, analisis data yang secara induktif dibangun dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi terhadap makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara pandang penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah dan jenis pendekatan juga semakin terlihat jelas pada tahun 1990an dan memasuki abad ke-21. Asal usul penelitian kualitatif berasal dari antropologi, sosiologi, humaniora, dan evaluasi. Berbagai jenis buku telah dirangkum, dan prosedur lengkap mengenai pendekatan penyelidikan kualitatif spesifik kini tersedia (Creswell 2018). Misalnya, Clandinin dan Connelly (2000) membangun gambaran tentang apa yang dilakukan peneliti naratif. Moustakas (1994) membahas prinsip filosofis dan prosedur metode fenomenologis; Charmaz (2006), Corbin dan Strauss (2007), serta Strauss dan Corbin (1998) mengidentifikasi prosedur grounded theory. Fetterman Fetterman (2010) dan Wolcott (2008) merangkum prosedur etnografi dan berbagai aspek serta strategi penelitian etnografi, dan Stake (1995) dan Yin (2014) menyarankan proses yang terlibat dalam penelitian studi kasus. Dalam buku ini, ilustrasi diambil dari strategi berikut, dengan menyadari bahwa pendekatan seperti penelitian tindakan partisipatif (Kemmis 2000), analisis wacana Cheek (2004), dan pendekatan lain yang tidak disebutkan juga merupakan cara yang tepat untuk melakukan penelitian kualitatif:

Penelitian naratif adalah suatu desain penyelidikan dari bidang humaniora di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka (Riessman 2008). Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau dipulihkan oleh peneliti menjadi sebuah kronologi naratif. Sering kali, pada akhirnya, narasi tersebut menggabungkan pandangan dari kehidupan partisipan dengan kehidupan peneliti dalam sebuah narasi kolaboratif (Clandinin 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Dialogis

Brent D. Ruben menyatakan bahwa pengertian komunikasi adalah proses dimana individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasikan lingkungannya dan orang lain. Model *coding-decoding* memandang komunikasi antarpribadi sebagai pengkodean informasi (misalnya merumuskan kalimat), menyampaikan pesan (misalnya berbicara), dan menguraikan pesan (misalnya mendengarkan dan memahami). Komunikasi yang sukses memerlukan saluran

transmisi yang jelas dan kode yang umum. Kesalahpahaman disebabkan oleh pesan yang diterjemahkan secara tidak benar atau adanya kesenjangan dalam pesan atau suara asing. Dari model ini, mereka memperoleh prinsip pertama: "Hindari saluran komunikasi dengan rasio *signal-to-noise* yang rendah, jika tidak, redundansi dapat ditingkatkan dengan memperkuat ide yang sama dalam bentuk yang berbeda.

Model identitas tujuan mengakui hal ini .kata-kata yang sama Bahwa model komunikasi ini menyiratkan mengakui niat komunikatif timbal balik. Komunikasi yang efektif memerlukan pengetahuan umum, terutama bahasa yang sama dan budaya yang sama, muncul pada saat terjadi konflik ketika perkataan pembicara ditafsirkan sesuai dengan prasangka pendengar tentang niatnya. Prinsip kedua ini memerintahkan pendengar untuk berusaha memahami maksud yang dimaksudkan pembicara.

Model ketiga, Pengambilan Perspektif, mengarahkan pembicara untuk memikirkan apa yang dipahami pendengar tentang dirinya ketika memutuskan apa yang akan dikatakan. Paradigma ketiga ini mengakui bahwa orang-orang yang memiliki bahasa dan budaya yang sama mempunyai pandangan dunia yang berbeda. Model ini memandu pembicara untuk membentuk pesannya sesuai dengan sudut pandang audiens. Komunikasi hilang ketika pembicara berasumsi bahwa sudut pandangnya lebih mirip dengan pendengar daripada yang sebenarnya terjadi, atau ketika persepsi pembicara terhadap perspektif pendengar didasarkan pada prasangka dan stereotip yang tidak akurat. Kesulitan lain muncul ketika pembicara berbicara kepada khalayak yang berbeda pada saat yang bersamaan. Terlepas dari permasalahan tersebut, prinsip keempat penulis mengarahkan pembicara untuk mengadopsi sudut pandang pendengar, yang mereka pertimbangkan ketika merumuskan apa yang mereka katakan.

Model keempat adalah model dialogis, dimana komunikasi dipandang sebagai proses kerja sama yang kolaboratif. Makna berasal dari situasi komunikatif dan hanya dapat dipahami dalam konteks tersebut. Model ini unik karena memperlakukan pendengar sebagai partisipan aktif dalam penciptaan pemahaman bersama. "Pendengar aktif mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi pernyataan yang tidak jelas, dan berupaya memastikan mereka dan teman-temannya memahami apa yang dibicarakan (Deutsch 2000).

Komunikasi dialogis merupakan suatu proses komunikasi yang didalamnya terjadi pertukaran ide, konsep dan informasi secara terbuka antara dua pihak atau lebih. Berikut beberapa poin penting terkait komunikasi dialogis: *pertama*, dua arah komunikasi dialogis bersifat dua arah, dimana masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya secara bergantian. Berbeda dengan komunikasi satu arah, dimana hanya satu pihak yang mengendalikan pembicaraan. *Kedua*, keterbukaan dalam komunikasi dialogis diasumsikan bahwa masing-masing pihak bersikap terbuka dalam mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya. Keterbukaan ini memungkinkan pertukaran informasi secara bebas dan mendorong pemahaman yang lebih baik di antara para pihak.

Ketiga, menghargai perbedaan dalam komunikasi dialogis, pendapat dan cara pandang masing-masing pihak dihormati. Perbedaan-perbedaan ini dipandang sebagai hal yang positif dan memperkaya diskusi, bukan sebagai ancaman atau hambatan. *Keempat*, sikap saling menghargai dalam komunikasi dialogis, masing-masing pihak diharapkan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal ini memerlukan mendengarkan secara aktif, tidak menyela, dan menghindari menghakimi atau meremehkan orang lain. *Kelima*, Menemukan solusi tujuan utama komunikasi dialogis adalah menemukan solusi atau konsensus terhadap masalah atau topik yang dibicarakan. Proses ini melibatkan pertukaran ide, negosiasi dan upaya untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Komunikasi dialogis sangat penting dalam berbagai konteks, seperti negosiasi bisnis, resolusi konflik, diskusi kelompok, dan hubungan interpersonal. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses komunikasi yang terbuka dan saling menghormati, komunikasi dialogis dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik, mengurangi kesalahpahaman dan menemukan solusi permasalahan yang lebih efektif.

2. Membangun Kepercayaan

Berbagai sarjana telah membahas atau mendefinisikan ketidakpercayaan. Deutsch mengatakan bahwa pilihan yang dipertanyakan adalah menghindari jalan yang tidak pasti yang mempunyai konsekuensi negatif lebih besar daripada konsekuensi positif, sebuah definisi yang bertentangan dengan definisinya tentang iman. Deutsch awalnya menggunakan istilah "kecurigaan" untuk merujuk pada ketidakpercayaan. Dengan menggunakan kedua istilah tersebut, jelas bahwa bagi Jerman, ketidakpercayaan dan kecurigaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setelah memeriksa definisi kamus Webster dan Random House tentang ketidakpercayaan, kecurigaan, kecurigaan, dan kecurigaan, kami menyimpulkan bahwa istilah-istilah ini hanya berbeda dalam derajatnya, bukan sifatnya (Chervany 2001). Webster mendefinisikan ketidakpercayaan sebagai kurangnya kepercayaan (sinonim dari ketidakpercayaan, kehati-hatian), sedangkan ketidakpercayaan didefinisikan sebagai kecurigaan bahwa ada sesuatu yang salah, ketidakpercayaan atau kecurigaan. Satu-satunya perbedaan antara kecurigaan dan ketidakpercayaan adalah bahwa kecurigaan dapat didasarkan pada sedikit bukti, sedangkan definisi kamus tentang ketidakpercayaan tidak menyebutkan bukti. Fox juga menyebut ketidakpercayaan (baik pribadi maupun institusional) sebagai kebalikan dari kepercayaan: "Saya mempercayai teman-teman saya; Aku mencurigai musuh-musuhku" (Chervany 2001).

Kepercayaan dan ketidakpercayaan yang tinggi tidak hidup berdampingan ketika konstruksi kepercayaan antarpribadi didefinisikan sebagai situasional, karena sulit membayangkan kepercayaan dan ketidakpercayaan yang tinggi dalam situasi yang sama. Misalnya, jika seseorang sangat yakin pasangannya akan setia di bawah godaan tertentu, maka dia tidak bisa begitu yakin bahwa pasangannya akan setia dalam keadaan yang sama. Oleh karena itu, definisi situasional tidak mendukung

hidup berdampingan antara rasa percaya dan ketidakpercayaan yang tinggi. Hal yang sama berlaku untuk rendahnya kepercayaan dan ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan institusional berarti bahwa seseorang percaya dengan kepastian atau kepastian yang relatif bahwa tidak ada kondisi yang menguntungkan dalam usaha atau bidang kehidupan yang berisiko yang akan mendukung keberhasilan situasi tersebut. Kurangnya kepercayaan struktural berarti seseorang sangat yakin bahwa tidak ada struktur pelindung asuransi, kontrak, peraturan, janji, sumber daya, proses, atau prosedur yang mendorong keberhasilan suatu situasi. Situasi abnormal berarti bahwa seseorang dengan yakin percaya bahwa situasi proyek yang berisiko tidak normal atau tidak menguntungkan atau menguntungkan bagi keberhasilan situasi tersebut.

Ketidakpercayaan mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki kecenderungan terus-menerus untuk tidak mau memercayai orang lain, biasanya dalam berbagai situasi dan orang. Kecurigaan terhadap kemanusiaan berarti berasumsi bahwa orang lain pada umumnya tidak jujur, baik hati, kompeten, dan mudah ditebak. Sub-konstruksi Keraguan Kemanusiaan dihipotesiskan mencakup empat atribut yang dijelaskan dalam definisi Kepercayaan pada Kemanusiaan sebelumnya. Ketidakpercayaan berarti bahwa terlepas dari asumsi orang lain, seseorang berharap untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan memperlakukan orang lain seolah-olah mereka tidak mempunyai niat baik dan tidak memercayai mereka.

Di sisi lain, kami tidak begitu yakin bahwa konstruksi ketidakpercayaan berhubungan erat dengan konstruksi kepercayaan. Meskipun ketidakpercayaan, seperti kepercayaan, sangat terkait dengan pengaruh, hal itu mungkin terkait atau tidak dengan aspek afektif dari kepercayaan. Karena konstruksi ketidakpercayaan sering kali mencerminkan emosi seperti kehati-hatian, kehati-hatian, sinisme, sikap defensif, kemarahan, ketakutan, kemarahan dan perasaan pengkhianatan, serta rasa tidak aman dan kurang percaya diri, ketidakpercayaan cenderung berbeda secara struktural dari kepercayaan, yang mana mencerminkan emosi seperti harapan, keamanan, kepastian dan kepercayaan diri. Emosi-emosi tersebut mungkin lebih ortogonal dibandingkan sekadar berada di ujung-ujung skala yang sama (Bustami 2020).

Kepercayaan diperlukan agar anggota organisasi dapat bersatu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Johnson, kepercayaan memiliki lima dimensi dan indikator: *pertama*, keterbukaan (*openness*) berbagi informasi, pemikiran, gagasan, perasaan dan reaksi terhadap permasalahan yang muncul. *Kedua*, berbagi (*Sharing*) kesediaan membantu orang menyelesaikan tugas. *Ketiga*, penerimaan komunikasi yang baik dengan anggota dan menghargai pendapat anggota. *Keempat*, dukungan (*support*) hubungan baik dengan manajemen dan kepercayaan bahwa mereka mempunyai keterampilan yang diperlukan. *Kelima*, niat untuk bekerja sama (*intention to cooperation*) harapan agar individu dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan (Melisa Dwi Putri 2015).

Membangun kepercayaan merupakan aspek penting dalam berbagai hubungan baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Berikut beberapa poin penting terkait membangun kepercayaan: *pertama*, kejujuran dan integritas adalah landasan terpenting dalam membangun kepercayaan. Ketika seseorang konsisten dalam mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai dengan nilai-nilainya, orang lain akan lebih mudah mempercayainya. *Kedua*, menepati janji adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa seseorang dapat dipercaya. Ketika seseorang mengatakan akan melakukan sesuatu dan kemudian melakukannya, hal itu membangun kepercayaan orang lain terhadapnya.

Ketiga, konsistensi dalam tindakan dan perkataan juga sangat penting dalam membangun kepercayaan. Jika seseorang berperilaku dan berbicara secara konsisten, orang lain akan lebih mudah memprediksi dan memercayai tindakannya di masa depan. *Keempat*, komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu membangun kepercayaan. Jika seseorang terbuka dalam menyampaikan informasi dan tidak menyembunyikan sesuatu yang penting, orang lain akan lebih mudah mempercayainya. *Kelima*, Menghargai privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh orang lain juga dapat membantu membangun kepercayaan. Ketika seseorang merasa data pribadinya terlindungi dengan baik, kepercayaan terhadapnya meningkat.

Keenam, pemenuhan kewajiban juga sangat penting untuk membangun kepercayaan. Jika seseorang dapat dipercaya untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka akan lebih mudah bagi orang lain untuk memercayainya dalam situasi lain. *Ketujuh*, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil juga dapat membangun kepercayaan. Ketika seseorang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya, orang lain akan lebih mudah memercayainya. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu dan kerja keras yang konsisten. Namun begitu kepercayaan terjalin, hubungan pribadi dan profesional menjadi lebih kuat dan produktif.

3. Manajemen Narasi

Untuk memahami fungsi pemeriksaan, yaitu benar-benar memaksimalkan manfaat inspeksi, meskipun manfaat tersebut bersifat relatif dan bergantung pada pentingnya kegiatan dan kontribusi yang diberikan serta besar kecilnya organisasi. Menurut Erni (2005), pengendalian memiliki enam fungsi yang harus dipahami, yaitu:

- a. Fungsi pengendalian adalah mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap indikator yang telah ditentukan.
- b. Fungsi administratif adalah mengambil tindakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang ditemukan.
- c. Fungsi pengendalian merupakan penerapan berbagai alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
- d. Tugas pengawasan adalah memperkuat rasa tanggung jawab kepada manajer yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pekerjaan.
- e. Tugas supervisi adalah melatih seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana dimaksud.

- f. Tugas pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan, penggelapan, kecerobohan dan kelemahan, sehingga tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Dilihat dari fokusnya, pengendalian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Pra-pengendalian

Pengendalian ini memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan seperti sumber daya manusia dan modal diperoleh sebelum memulai operasi. Tempat

- b. Pemantauan serentak

Pemantauan dilakukan ketika operasi dilakukan. Pengendalian ini sering disebut dengan *yes/no*, *screening*, atau *stop-and-go*, dan dilakukan selama pengoperasian.

- c. Manajemen umpan balik

Manajemen umpan balik, juga dikenal sebagai manajemen kinerja masa lalu, mengukur hasil tindakan yang diambil. Alasan penyimpangan dari rencana atau standar diselidiki dan hasilnya diterapkan pada kegiatan serupa di masa depan (Yusuf 2023).

Manajemen naratif adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara terstruktur dan persuasif. Tujuannya adalah untuk membentuk persepsi, mempengaruhi opini dan mengendalikan arus informasi mengenai suatu topik atau peristiwa tertentu. Berikut beberapa poin penting terkait manajemen naratif: *pertama*, pembingkai naratif (*narrative framing*) manajemen naratif melibatkan konstruksi cerita atau kisah tertentu yang ingin disampaikan. Cerita ini dirancang menarik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. *Kedua*, memilih sudut pandang yang tepat sangat penting dalam pengelolaan cerita. Perspektif ini menentukan bagaimana peristiwa atau tema disajikan dan ditafsirkan.

Ketiga, bahasa dan simbol yang digunakan dalam cerita berperan penting dalam mempengaruhi persepsi dan perasaan penonton. Pemilihan kata dan simbol tertentu dapat memperkuat atau melemahkan pesan yang disampaikan. *Keempat*, penekanan selektif manajemen naratif sering kali melibatkan penekanan selektif pada aspek-aspek tertentu dari isu atau peristiwa tertentu sambil meminimalkan atau bahkan mengabaikan aspek-aspek lainnya. *Kelima*, salah satu tujuan utama manajemen narasi adalah mengelola arus informasi dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial, dan humas digunakan untuk tujuan ini. *Keenam*, membangun kepercayaan manajemen narasi yang efektif memerlukan kepercayaan audiens target Anda. Oleh karena itu, kredibilitas dan reputasi entitas pengelola laporan sangatlah penting. *Ketujuh*, menanggapi kontra-narasi dalam situasi tertentu, pengendalian narasi juga melibatkan upaya untuk merespons atau menetralkan kontra-narasi yang bertentangan dengan narasi utama yang dikendalikan.

Manajemen naratif dapat digunakan dalam banyak konteks, seperti politik, bisnis, pemasaran, hubungan masyarakat, dan bahkan situasi krisis atau konflik. Namun, kita juga harus mempertimbangkan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan etika dalam pengelolaan berita, sehingga tidak digunakan untuk menyebarkan informasi jahat yang menyesatkan atau memanipulasi opini publik.

4. Rekonsiliasi Berbasis Budaya

Selo Soemardjan menyatakan perubahan yang diinginkan atau direncanakan adalah perubahan yang diramalkan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan dalam masyarakat (Selo Soemardjan & Soleman 1974). Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah segala hasil karya dan kegiatan serta gagasan dari keseluruhan sistem perasaan dan karya yang dihasilkan dalam kehidupan sosial masyarakat, yang menjadi apa yang mereka pelajari (Kusumohamidjojo 2010). Kebudayaan adalah kegiatan batin, kemampuan menafsirkan, yang dapat berupa seni, benda-benda hasil kegiatan manusia, dan rasa membedakan yang baik dan yang jahat (Turner 2012).

Kedamaian bukan hanya tentang fisik tetapi juga tentang keadaan batin. Kamus Oxford Learner mendefinisikan perdamaian sebagai negara yang bebas dari perang, kekacauan, perselisihan, kekerasan dan kecemasan. Menurut Albert Einstein, perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, tetapi adanya keadilan, hukum dan ketertiban, singkatnya adanya pemerintahan (Ichsan Malik 2004).

Menurut Johan Galtung, perdamaian bukan hanya sekedar pengurangan kekerasan (pengobatan) tetapi juga upaya menghindari kekerasan (pencegahan). Lebih lanjut Johan Galtung membagi konsep perdamaian menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, konsep perdamaian positif (usaha mengatasi permasalahan yang menjadi akar penyebab konflik); *Kedua*, konsep perdamaian negatif (diimplementasikan hanya untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan akibat konflik); *Ketiga*, konsep perdamaian yang komprehensif (usaha memadukan konsep perdamaian positif dan negatif) (Hendry 2009).

Rekonsiliasi budaya merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendamaikan konflik atau ketegangan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Beberapa poin penting terkait rekonsiliasi berbasis budaya diuraikan sebagai berikut: *pertama*, rekonsiliasi berbasis budaya didasarkan pada menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari dominasi satu budaya tertentu dan untuk memastikan bahwa semua kelompok budaya merasa dihargai dan terwakili. *Kedua*, peran tokoh budaya, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, sangat penting dalam proses rekonsiliasi. Mereka dapat menjembatani kelompok-kelompok yang berkonflik dan mengkomunikasikan perspektif budaya mereka. *Ketiga*, dialog antarbudaya merupakan faktor kunci dalam rekonsiliasi budaya. Melalui dialog ini, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling memahami nilai-nilai, tradisi, dan sudut pandang budaya masing-masing serta mencari titik temu dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Keempat, penyelesaian konflik dengan kearifan lokal rekonsiliasi berbasis budaya juga menggunakan kearifan lokal dan mekanisme penyelesaian konflik yang sudah ada dalam budaya masyarakat lokal. Misalnya melalui refleksi, mediasi adat, atau upacara adat yang bertujuan menyatukan kelompok-kelompok yang berkonflik. *Kelima*, membangun kembali hubungan dan rekonsiliasi tujuan utama rekonsiliasi berbasis budaya adalah memulihkan hubungan dan memperbaiki ikatan sosial yang rusak antar kelompok yang berkonflik. Hal ini dilakukan dengan menciptakan rasa saling pengertian, memaafkan dan hidup berdampingan secara damai. *Keenam*, menciptakan identitas kolektif dalam beberapa kasus, rekonsiliasi budaya juga bertujuan untuk menciptakan identitas kolektif yang lebih utuh dan mengatasi polarisasi kelompok. Identitas kolektif ini dilandasi oleh nilai-nilai budaya bersama dan menjembatani perbedaan antar kelompok. *Ketujuh*, pelestarian budaya dan tradisi proses rekonsiliasi bertujuan untuk melestarikan budaya dan tradisi yang merupakan warisan bersama, serta menghormati kontribusi masing-masing kelompok terhadap pembentukan identitas budaya seluruh masyarakat.

Rekonsiliasi budaya memerlukan komitmen jangka panjang, kesabaran dan kerja jangka panjang dari semua pihak. Namun dengan menghormati keragaman budaya dan menggunakan kearifan lokal, rekonsiliasi dapat membantu masyarakat mengatasi konflik dan membangun perdamaian yang lebih abadi

5. Komunikasi Lintas-Identitas

Mengenai perbedaan etnis dalam komunikasi, teori komunikasi identitas telah dikembangkan atau diteliti untuk menjelaskan hakikat komunikasi etnis-etnis. Kata *etnisitas* berasal dari kata Yunani *ethnos* yang berarti bangsa atau rakyat. Dalam teori komunikasi identitas, komunikator selalu mencantumkan identitas pribadinya, namun identitas itu sendiri memerlukan berbagai ukuran yang luas, baik secara budaya maupun dari pihak lain (Littlejohn 2009). Menurut Alo Liliwer, kata identitas secara epistemologis berasal dari kata identitas, yang artinya: *pertama*, kondisi atau realitas sesuatu yang serupa, keadaan yang mirip satu sama lain. *Kedua*, kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama antara dua orang atau dua benda. *Ketiga*, kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama antara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda (Liliweri 2007).

Identitas diri didasarkan pada karakteristik pribadi unik seseorang. Perilaku budaya, suara, gerak anggota tubuh, warna pakaian dan gaya berpakaian menunjukkan ciri khas seseorang yang tidak dimiliki orang lain. Menurut Thomas Fredrik Weybye Barth dalam bukunya *Ethnic Identity is a Social Stigma*, seorang anggota suatu kelompok etnis selalu berusaha berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar yang membentuk identitas etnisnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang anggota kelompok selalu berusaha menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan identitas kelompoknya karena khawatir jika tidak menyesuaikan diri atau menyimpang maka akan merusak citra identitas kelompoknya.

Menurut Michael Hecht dan rekan Littlejohn, teori komunikasi identitas memadukan tiga konteks budaya, yaitu individu, komunitas, dan publik (Littlejohn 2009). Menurut teori ini, identitas merupakan penghubung terpenting antara

individu dan masyarakat, dan komunikasi merupakan penghubung yang memungkinkan terjadinya hubungan tersebut. Tentu saja identitas merupakan "kode" yang mendefinisikan milik seseorang dalam komunitas yang berbeda. Dalam keadaan tertentu, seseorang dapat menampilkan identitas dirinya, namun pada lingkungan atau keadaan lain diperlukan standar nilai yang berbeda (Barth 1969). Melalui hal ini terbentuklah identitas baik dari sudut pandang diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, identitas ini bersifat individual, sosial dan komunal.

Komunikasi antar identitas mengacu pada proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dengan latar belakang identitas yang berbeda. Berikut beberapa poin penting mengenai komunikasi antar identitas: *pertama*, memahami perbedaan identitas komunikasi antar identitas memerlukan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan identitas, seperti budaya, suku, agama, gender, orientasi seksual atau yang lainnya. Perbedaan-perbedaan ini dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi, berperilaku dan menafsirkan pesan. *Kedua*, mengembangkan kepekaan budaya penting untuk komunikasi yang efektif antara identitas yang berbeda. Hal ini memerlukan pemahaman nilai, norma, dan pandangan dunia dari berbagai identitas serta mengadaptasi gaya komunikasi. *Ketiga*, menghindari stereotip dan prasangka stereotip dan prasangka dapat menjadi penghalang yang signifikan terhadap komunikasi antar-identitas. Oleh karena itu, penting untuk menghindari generalisasi yang berlebihan dan mencoba melihat setiap individu secara individual, apa pun identitas kelompoknya.

Keempat, mendengarkan secara aktif sangat penting dalam komunikasi antarpribadi. Dibutuhkan upaya untuk memahami sudut pandang lawan bicara, menunjukkan empati dan menghargai perbedaan sudut pandang atau pengalaman. *Kelima*, menggunakan bahasa inklusif dan tidak menyinggung adalah kunci komunikasi antarpribadi. Hindari penggunaan istilah atau bahasa yang bias, diskriminatif, atau menyinggung identitas tertentu. *Keenam*, membangun hubungan dan kepercayaan komunikasi yang efektif antar identitas memerlukan upaya untuk membangun hubungan dan kepercayaan antar pihak. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. *Ketujuh*, manajemen konflik yang baik dalam komunikasi antar identitas, konflik bisa muncul karena perbedaan sudut pandang atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk mengelola konflik dengan baik melalui dialog, negosiasi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Komunikasi antar identitas memainkan peran penting dalam menciptakan pemahaman, mengurangi prasangka, dan mendorong inklusi dan kohesi sosial di berbagai masyarakat. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi antar-identitas, kita dapat membangun jembatan melintasi perbedaan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati.

KESIMPULAN

Berikut beberapa strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk mencegah konflik dan membangun jembatan antara TNI dan eks pejuang GAM di Aceh.

Pencegahan konflik dan reunifikasi TNI dan mantan pejuang GAM di Aceh memerlukan komitmen jangka panjang, pendekatan holistik dan partisipasi semua pihak. Dengan strategi komunikasi yang tepat, harapannya adalah tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi serta membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Aceh.

Pertama, menciptakan dialog terbuka memfasilitasi dialog terbuka antara TNI dan eks pejuang GAM merupakan hal yang penting langkah dalam konstruksi bersama. pemahaman dan keyakinan. Dialog ini harus berlangsung dalam suasana aman, saling menghormati dan fokus mencari solusi damai.

Kedua, keterlibatan pemimpin lokal, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat yang dihormati oleh kedua belah pihak dapat membantu membangun hubungan baik dan rekonsiliasi. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan perdamaian dan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

Ketiga, menggunakan kearifan dan budaya lokal Aceh memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi. Memasukkan nilai-nilai budaya, tradisi dan upacara adat ke dalam proses rekonsiliasi dapat membantu membangun kepercayaan dan rasa memiliki bersama.

Keempat, menciptakan narasi bersama yang menekankan perdamaian, rekonsiliasi, dan masa depan yang lebih baik dapat membantu melemahkan perasaan bermusuhan dan memfasilitasi saling pengertian. Kisah ini harus senantiasa disampaikan melalui berbagai media dan saluran komunikasi.

Kelima, Pengembangan program pemberdayaan ekonomi konflik seringkali menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Mengembangkan kekuatan ekonomi di kedua belah pihak dapat membantu meningkatkan hubungan dan menciptakan kepentingan bersama dalam pembangunan perdamaian.

Keenam, melibatkan generasi muda partisipasi generasi muda dalam upaya rekonsiliasi penting untuk menjamin keberlanjutan perdamaian di masa depan. Pendidikan perdamaian, program pemuda antar-identitas dan kegiatan sosial bersama dapat membantu menciptakan pemahaman dan rasa persatuan di kalangan generasi muda.

Ketujuh, pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi tantangan dan menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Umpan balik dari masyarakat dan kedua belah pihak sangat penting untuk menjamin efektivitas strategi komunikasi dalam pencegahan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. 20019. *Islam and Nation*. California: Stanford University Press.
- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Groups And Boundaries*. London: George Allen & Unwin, .
- Burke, Patrick Barron and Adam. 2008. *Supporting Peace in Aceh: Development Agencies and International Involvement*. Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd.

- Bustami, Zulham &. 2020. *Pembangkangan Gerakan Aceh Merdeka Dalam Peluncutan Senjata (The Undiscussed Case)*. Yogyakarta: Amara Books.
- Charmaz, K. 2006. *Constructing grounded theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cheek, J. 2004. "At the margins? Discourse analysis and qualitative research." *Qualitative Health Research*, 14 1140–1150.
- Chervany, Harrison McKnight and Norman L. 2001. "Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time." In *Pembangkangan Gerakan Aceh Merdeka Dalam Peluncutan Senjata (The Undiscussed Case)*, by Zulham & Bustami., 41. Yogyakarta: Amara Books.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. 2000. *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Corbin, J. M., & Strauss, J. M. 2007. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: : Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Deutsch, Morton and Coleman, Peter T. 2000. *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, Publishers.
- Erni, Tris Kurniawan Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, . Jakarta: Prenada Media.
- Fetterman, D. M. 2010. *Ethnography: Step by step (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hendry, Ar Eka. 2009. *Sosiologi Konflik*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Ichsan Malik, (ed.). 2004. *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Jakarta: : Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. 2000. "Participatory action research." In *Handbook of qualitative research (2nd ed)*, by N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), 567–605. Thousand Oaks CA: Sage.
- Kingsbury, Damien. 2006. *Peace in Aceh. A Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Jakarta: PT Equinox Publishing.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2010. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Lkis.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Melisa Dwi Putri, & Erika Setyanti Kusumaputri. 2015. "Kepercayaan (Trust) Terhadap Pengurus Organisasi dan Komitmen Afektif pada Organisasi Mahasiswa Daerah di Yogyakarta ." *Jurnal Psikologi Integratif* 2.(1) 55.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 9 (2024) 4012 - 4027 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i9.2443

- Moustakas, C. 1994. *Phenomenological research methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ramadhan, Ardito. 2024. *TNI Sinyalir Partai Lokal Aceh Wadah Aspirasi Eks Kombatan GAM, Berpotensi Timbulkan Konflik*. News, Nasional: Kompas.
- Riessman, C. K. 2008. *Narrative methods for the human sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Selo Soemardjan & Soleman, Soemardi (ed). 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Stake, R. E. 1995. *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Strauss, A., & Corbin, J. 1998. *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA : Sage.
- Turner, Bryan S. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wolcott, H. T. 2008. *Ethnography: A way of seeing (2nd ed.)*. Walnut Creek, CA: AltaMira.
- Yin, R. K. 2014. *Case study research (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yusuf, M. 2023. *Teori Manajemen*. Sumatera Barat: YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA MUSLIM.